



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3221538 Laman www.kalteng.go.id post-el: ukpbj@biropbj.kalteng.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nama : SUHARNO, ST., M.Si
NIP : 196808061989031013
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / (IV/b)
Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Menyatakan bahwa Dokumen Pendukung untuk Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Berikut :

1. SARANA DAN PRASARANA

Layanan Inklusif/Aksesibilitas Penyandang Disabilitas :

- b. Terdapat Formulir Permohonan Informasi menggunakan Huruf Braille
- c. Kursi Roda
- d. Alat bantu dengar suara untuk tuna netra

Tanggapan : Poin b, c dan d Biro Pengadaan Barang dan Jasa Belum memiliki fasilitas tersebut.

2. KUALITAS INFORMASI

Dimensi waktu informasi, yaitu informasi bersifat up to date, tersedia setiap saat dan tersedia dalam waktu tertentu :

- m. Badan Publik menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) hasil Uji Konsekuensi sesuai dengan Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (lampirkan dokumen proses uji konsekuensi yang terdiri dari : a. Surat usulan, b. Berita Acara, c. Absensi d. Dokumentasi
- n. angka Waktu pengecualian informasi merujuk kepada Perki 1/2021. Pencantuman Jangka Waktu harus jelas dan tegas (bukti dalam Lembar Pengujian Konsekuensi)
- o. Mencantumkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam Pengecualian Informasi (bukti dalam Lembar Pengujian Konsekuensi)

Tanggapan : Poin m, n, o dapat kami sampaikan bahwa Biro PBJ saat ini sedang dalam proses koordinasi dengan PPID Utama untuk melakukan reviu dan penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) serta Lembar Pengujian Konsekuensi agar selaras dengan Perki 1/2021. Dokumen administratif pendukung (Surat Usulan, Berita Acara, Absensi, Dokumentasi) serta penegasan jangka waktu dan dasar hukum undang-undang sedang dalam tahap finalisasi internal dan belum dapat dilampirkan pada periode penilaian ini.

Konten informasi, yaitu Informasi bersifat akurat, relevan dan sesuai kebutuhan publik :

- c. Badan Publik melakukan sosialisasi tentang anti-HOAXS (bukti dukungnya : laporan kegiatan, Flyer kegiatan tahun 2025)

Tanggapan : poin c Biro Pengadaan Barang dan Jasa belum pernah membuat dan melakukan Sosialisasi terkait anti-HOAXS

3. JENIS INFORMASI

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik; Point a sampai dengan d merupakan satu kesatuan :

- a. Dokumen pendukung; Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk
- b. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
- c. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;

Tanggapan : Poin a, b dan c Bersama ini kami sampaikan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Biro PBJ merupakan unit kerja pelaksana teknis operasional pengadaan, bukan unit kerja pembentuk regulasi ataupun produk hukum kedinasan.

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan :

5. Daftar Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan (bagi OPD yg tidak mengeluarkan perizinan maka OPD melampirkan surat pernyataan)
11. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2025

Tanggapan : Poin 5 dan 11 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki kewenangan dan tidak menerbitkan perizinan apa pun.

4. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID

Bukti Kegiatan :

- a. Bukti kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik (contoh surat jawaban Badan Publik atas permohonan Informasi dan atau keberatan)
- b. Bukti kegiatan Pelaksanaan Uji Konsekuensi untuk menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan
- c. Bukti kegiatan Pelaksanaan Penanganan Keberatan Informasi Publik
- d. Bukti kegiatan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Tanggapan : Poin a, b, c dan d Selama periode penilaian, Biro PBJ tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat (Nihil).

Pemahaman Substansi :

PPID Utama dan PPID Pelaksana Melaksanakan hasil putusan sengketa informasi publik (jika tidak ada lampirkan surat pernyataan)

Tanggapan : Selama periode penilaian berjalan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa) tidak memiliki riwayat sengketa informasi publik

5. DIGITALISASI

Layanan Publik Digital :

3. Menyelenggarakan Layanan/Saluran informasi interaktif di media sosial (podcast, Youtube Channel, Live) yang diselenggarakan berkala, setidaknya 2x di tahun 2025

Tanggapan : Selama periode penilaian berjalan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak memiliki pernah melakukan podcast

INOVASI :

3. Badan Publik menyediakan Formulir (e-formulir atau fisik) permohonan informasi dan keberatan untuk penyandang disabilitas

Tanggapan : Selama periode penilaian berjalan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak memiliki pernah keberatan untuk penyandang disabilitas

6. **BARANG DAN JASA**

Tahap Pelaksanaan :

- c. Terdapat Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre-Construction Meeting / PCM): Keterangan: Dokumen hasil rapat koordinasi awal (khusus untuk paket bernilai besar, kompleks, atau e-purchasing Pekerjaan Konstruksi) yang membahas jadwal pengiriman, personel, dan metode kerja.
- d. Terdapat Dokumen Surat Pemberitahuan Rencana Pengiriman: Keterangan: Surat resmi dari penyedia kepada PPK mengenai jadwal estimasi tibanya barang/jasa di lokasi tujuan

Tanggapan : Poin c dan d Biro PBJ tidak adanya paket pekerjaan yang sifat nya paket bernilai besar, kompleks, atau e-purchasing Pekerjaan Konstruksi

Dokumen Perubahan Kontrak (Kondisional) Keterangan: jika tidak ada silahkan lampirkan surat pernyataan yang diotorisasi oleh pimpinan Badan Publik :

- a. Berita Acara Negosiasi Amandemen Kontrak
- b. Surat Amandemen / Adendum Surat Pesanan

Tanggapan : Tidak ada Perubahan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pada Paket Pekerjaan yang dilaksanakan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,**



SUHARNO, S.T., M.Si

Pemimpin Tingkat I

NIP. 196808061989031013